



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempu dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Renja BPBD Tahun 2022 akan dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022. Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat memberikan batasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng, 2021
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199202 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	13
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	21
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	26
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	27
BAB V : PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Tahun 2018 s/d Tahun 2021	5
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD	11
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022	14
Tabel 4.1	Rumusan rencana program dan kegiatan BPBD Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan Pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah** (*Renja-PD*), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) Undang-Undang 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan perpedoman pada Renstra-PD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang lebih baik, sesuai visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara khusus, penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah untuk mengetahui :

1. Evaluasi Program dan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Tujuan dan sasaran
3. Indikator kinerja dan kelompok sasaran
4. Pagu indikatif program, kegiatan dan sub-kegiatan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, Analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Rencana kerja, Program dan kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2021 adalah :

1. Prose pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang cukup lambat karena penggunaan aplikasi barang dan jasa yang tergolong baru memerlukan waktu lebih lama terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Perencanaan yang ada fokus pada tindakan dan belum fokus pada apa yang akan dicapai.
3. Masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh kurangnya data yang valid.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi barang dan jasa dan penyediaan SDM yang kompeten dalam pengoperasiannya.
2. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Mengupayakan pengumpulan data lapangan yang valid melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada *Tabel 2.1* :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2018 s/d Tahun 2021

Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018 s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1 05 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	92,88 %	100 Persen	97,48 %	97,48	100 Persen	51,67	31,00
2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	21 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	9	42,86
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	7	43,75
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	24	40,00
2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	42 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00	18 Laporan	36	327,27
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24	40,00

07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00	18 Laporan	36	40,00
2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24	40,00
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	90 Unit	0	0	0	0,00	45 Unit	3	0,00
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100,00	0	3	100,00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	0	3 Bulan	3 Bulan	100,00	0	3	25,00
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Exemplar	0	0	0	0,00	2 Exemplar	0	0,00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	120 Orang	0	40 Orang	40 Orang	100,00	40 Orang	40	30,77
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	198 Kali	46 Kali	35 Kali	35 Kali	100,00	37 Kali	81	40,91
2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	43 Unit	2 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00	21 Unit	17	39,53
05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang diadakan	28 Unit	0	11 Unit	11 Unit	100,00	16 Unit	11	39,29
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	15 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	6 Unit	6	40,00

2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	- 12 Bulan	24	40,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	1060 Lembar	150 Lembar	260 Lembar	260 Lembar	100,00	260 Lembar	410	38,68
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24	40,00
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24	40,00
2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan	21 Unit	12 Unit	13 Unit	12 Unit	92,31	19 Unit	25	91,05
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11 Unit	11 Unit	9 Unit	8 Unit	88,89	12 Unit	11	91,82
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	9 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	7 Unit	3	33,33
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	1	100,00
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN LAYANAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN BENCANA	100 Persen	0	0	0	0	100 Persen	0	0
2 01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	0	0	0	0	100 Persen	0	0,00
01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0,00

02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100.000 Jiwa	0	0	0	0	50.000 Jiwa	0	0,00
2 02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	0	0	0	0	100 Persen	0	0,00
01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0,00
02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	250 Orang	0	0	0	0	125 Orang	0	0,00
03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	920 Jiwa	0	0	0	0	100 Jiwa	0	0,00
04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Peralatan Perlindungan	185 Jiwa	0	0	0	0	100 Jiwa	0	0,00
07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	77 Kejadian	0	0	0	0	37 Kejadian	0	0,00
08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	36 Orang	0	0	0	0	16 Orang	0	0,00
09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun per jenis ancaman bencana	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0,00

2 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	0	0	0	0	100 Persen	0	0,00
02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	41 Kali	0	0	0	0	17 kali	0	0,00
03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	16 Jiwa	0	0	0	0	7 Jiwa	0	0,00
04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0,00
05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	230 Orang	0	0	0	0	100 Orang	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bencana dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah ditetapkan. Berikut SPM dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
2. Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Indeks Risiko Bencana

Secara lebih rinci, target dan capaian SPM dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPBD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	YA		100	100	100	90,32	95,00	100	100	
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	YA		100	100	100	94,65	90,11	100	100	
3	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	YA		100	100	100	92,00	91,47	100	100	
4	Indeks Risiko Bencana		YA	119,20	118,85	115,92	119,20	119,20	118,85	115,92	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Permasalahan	Hambatan
Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki Peta rawan bencana	Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana
Masih adanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan	Penegakan hukum dibidang tata ruang masih perlu ditingkatkan
Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanganan bencana	
Masih terjadinya bencana wabah penyakit tertentu (Pandemi Covid-19)	Belum diketahuinya obat yang dapat menyembuhkan Penyakit Covid-19

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Peluang dan tantangan yang dihadapi

Peluang	Tantangan
Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan	Peningkatan tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan
Peningkatan kecepatan akses informasi	
Tingginya perhatian Dunia Usaha, LSM, Lembaga Pendidikan dan Ormas dalam bidang Penanggulangan Bencana	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

- **Proses yang dilakukan dalam membandingkan anatara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam prioritas penanganan bencana meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 2.702.367.357,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.702.367.357,-
2. Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 1.157.037.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 1.157.037.000,-

- **Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yakni:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ingin dicapai:
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai:
Persentase Jumlah warga Negara yang mendapatkan layanan perlindungan terhadap ancaman bencana.

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkajene Sidenreng	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	2.702.367.357	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkajene Sidenreng	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	2.702.367.357	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5	33.701.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5	33.701.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	18.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	18.100.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	15.601.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	15.601.000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan administrasi keuangan	18	2.178.256.357	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan administrasi keuangan	18	2.178.256.357	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	2.174.066.357	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	2.174.066.357	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18	4.190.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18	4.190.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12	143.511.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12	143.511.000	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	8.600.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sidrap	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	8.600.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene Sidenreng	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indonesia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkajene Sidenreng	Waktu bahan logistik kantor yang disediakan	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkajene Sidenreng	Waktu bahan logistik kantor yang disediakan	0	0	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkajene Sidenreng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2.400.000	

5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pangkajene Sidenreng	Jumlah tamu yang difasilitasi	40	3.117.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pangkajene Sidenreng	Jumlah tamu yang difasilitasi	40	3.117.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	37	129.394.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	37	129.394.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	21	91.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	21	91.000.000	
1	Pengadaan Meubel	Pangkajene Sidenreng	Jumlah meubel yang diadakan	16	12.000.000	Pengadaan Meubel	Pangkajene Sidenreng	Jumlah meubel yang diadakan	16	12.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	6	79.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	6	79.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	124.215.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	124.215.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen bermaterai	260	2.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	Jumlah dokumen bermaterai	260	2.600.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	26.748.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	26.748.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenreng	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	94.867.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenreng	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	94.867.000	

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan	19	108.684.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene Sidenreng	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan	19	108.684.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene Sidenreng	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	89.075.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene Sidenreng	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	89.075.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	7	3.055.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	7	3.055.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	16.554.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene Sidenreng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	1	16.554.000	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Sidrap	PERSENTASE JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN LAYANAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN BENCANA	100	1.157.037.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Sidrap	PERSENTASE JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN LAYANAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN BENCANA	100	1.157.037.000	

1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	270.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	270.000.000	
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun	1	270.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun	1	270.000.000	
VI	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Sidrap	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	50.000	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Sidrap	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	50.000	0	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Sidrap	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	819.950.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Sidrap	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	819.950.000	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun	1	270.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun	1	270.000.000	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	125	70.350.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	125	70.350.000	

3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	270	35.200.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	270	35.200.000	
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Sidrap	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Peralatan Perlindungan	100	181.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Sidrap	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Peralatan Perlindungan	100	181.000.000	
5	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	37	17.000.000	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	37	17.000.000	
6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	16	209.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	16	209.000.000	
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Sidrap	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun per jenis ancaman bencana	1	147.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Sidrap	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun per jenis ancaman bencana	1	147.000.000	

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Sidrap	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	67.087.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Sidrap	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	67.087.000	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	17	17.500.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	17	17.500.000	
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	7	6.800.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	7	6.800.000	
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia	0	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia	0	0	
4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Sidrap	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	42.787.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Sidrap	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	42.787.000	

2.5 Penelaahan Usulan Prigram dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, yaitu : *Nihil*

BAB III

TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”* dengan misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2022 sebagai mana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Tema pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2022. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada

pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP 2022 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan

Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan

keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2022, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang ingin dicapai setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan, dengan indikator perdikat nilai SAKIP.
- b. Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil musrenbang dengan mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja BPBD Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu indikatif usulan sebesar Rp. 3.859.404.357,-. Sumber Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Meubel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 5) Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
- 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 7) Penyusunan Rencana Kontijensi

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KAB. SIDRAP TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode				Urusan/Bidan Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG								
				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANTIBUM LINMAS								
1	05.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pangkajene Sidenreng	100	2.702.367.357	DAU		100	2.852.367.357
1	05.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Pangkajene Sidenreng	5	33.701.000	DAU		5	84.201.000
1	05.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	4	18.100.000	DAU		4	37.201.000
1	05.01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene Sidenreng	12	15.601.000	DAU		12	47.000.000
1	05.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	Pangkajene Sidenreng	18	2.178.256.357	DAU		18	2.191.466.357
1	05.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	12	2.174.066.357	DAU		12	2.174.066.357

1	05.01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Pangkajene Sidenreng	18	4.190.000	DAU		18	17.400.000
1	05.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah yang dihasilkan	Pangkajene Sidenreng	2	8.000.000	DAU		2	8.000.000
1	05.01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah kebutuhan barang milik daerah yang disusun	Pangkajene Sidenreng	2	8.000.000	DAU		2	8.000.000
1	05.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang tersedia	Pangkajene Sidenreng	1	15.000.000	DAU		1	15.000.000
1	05.01	2.05	01	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang disediakan pakaian dinas beserta atributnya	Pangkajene Sidenreng	47	15.000.000	DAU		47	15.000.000
1	05.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	Pangkajene Sidenreng	12	143.511.000	DAU		12	197.500.000
1	05.01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	45	8.600.000	DAU		45	8.600.000
1	05.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	0	0	DAU		0	0
1	05.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu bahan logistik kantor yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	0	0	DAU		0	0
1	05.01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	2	2.400.000	DAU		2	2.400.000
1	05.01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Pangkajene Sidenreng	40	3.117.000	DAU		50	4.500.000

1	05.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indonesia	37	129.394.000	DAU		42	182.000.000
1	05.01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	Pangkajene Sidenreng	21	91.000.000	DAU		19	101.000.000
1	05.01	02.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang diadakan	Pangkajene Sidenreng	16	12.000.000	DAU		11	24.000.000
1	05.01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Pangkajene Sidenreng	6	79.000.000	DAU		8	77.000.000
1	05.01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pangkajene Sidenreng	12	124.215.000	DAU		12	137.800.000
1	05.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Pangkajene Sidenreng	260	2.600.000	DAU		280	2.800.000
1	05.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene Sidenreng	12	26.748.000	DAU		12	28.000.000
1	05.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene Sidenreng	12	94.867.000	DAU		12	107.000.000
1	05.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan	Pangkajene Sidenreng	19	108.684.000	DAU		19	117.400.000
1	05.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pangkajene Sidenreng	12	89.075.000	DAU		12	70.000.000
1	05.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	Pangkajene Sidenreng	7	3.055.000	DAU		7	7.400.000

1	05.01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	Pangkajene Sidenreng	1	16.554.000	DAU		1	40.000.000
1	05.03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENDAPATKAN LAYANAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN BENCANA	Kab. Sidrap	100	1.157.037.000	DAU		100	1.434.287.000
1	05.03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Sidrap	100	270.000.000	DAU	Kegiatan SPM	100	360.000.000
1	05.03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun	Kab. Sidrap	1	270.000.000	DAU		1	270.000.000
1	05.03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	Kab. Sidrap	50.000	0	DAU		50.000	90.000.000
1	05.03	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Sidrap	100	819.950.000	DAU	Kegiatan SPM	100	886.787.000
1	05.03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun	Kab. Sidrap	1	270.000.000	DAU		1	160.400.000
1	05.03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	Kab. Sidrap	125	70.350.000	DAU		125	70.350.000
1	05.03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	Kab. Sidrap	270	35.200.000	DAU		650	120.000.000

1	05.03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Peralatan Perlindungan	Kab. Sidrap	100	181.000.000	DAU		85	160.000.000
1	05.03	2.02	07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	Kab. Sidrap	37	17.000.000	DAU		40	22.000.000
1	05.03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	Kab. Sidrap	16	209.000.000	DAU		20	207.037.000
1	05.03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun per jenis ancaman bencana	Kab. Sidrap	1	147.000.000	DAU		1	147.000.000
1	05.03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Sidrap	100	67.087.000	DAU	Kegiatan SPM	100	187.500.000
1	05.03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Sidrap	17	17.500.000	DAU		24	25.000.000
1	05.03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Sidrap	7	6.800.000	DAU		9	12.000.000
1	05.03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia	Kab. Sidrap	0	0	DAU		1	87.500.000
1	05.03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Sidrap	100	42.787.000	DAU		130	63.000.000
JUMLAH								3.859.404.357				4.286.654.357

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini dilaksanakan oleh segenap jajaran dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan Renja yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan output penanggulangan bencana setiap tahunnya.

Pangkajene Sidenreng, 2021
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SIARA BARANG,SH.,M.Si
Nip. 19651231 199203 1 270